

Forum Freedom 38, 6 Februari 2006

**Tema: Demokrasi dan Kebebasan Sipil**

**Nara sumber : William Liddle**

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

Hamid Basyaib:

Halo selamat pagi saudara anda berjumpa lagi dengan saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom dan tamu saya pagi ini seperti minggu lalu adalah Profesor R William Liddle yang biasa saya panggil pak Bill. Pak Bill Liddle tema kita adalah tema yang disukainya dan pasti dikuasainya betul. Selamat pagi dulu pak Bill.

William Liddle:

Selamat pagi bung Hamid Basyaib

Hamid Basyaib:

Tema kita pak Bill adalah demokrasi dan kebebasan sipil, *democracy and civil liberties* ini adalah dua konsep yang sangat penting di dalam ilmu politik dan semakin lama semakin penting, bukan karena ia terpromosikan saja, tapi karena juga banyak dihambat. Misalnya di Indonesia nanti kita ngomong. Tetapi kita mau ngomong dulu hal yang paling dasar yaitu kebebasan sipil itu adalah atau hak-hak sipil juga bisa dikatakan suatu pengandaian bahwa negara itu punya peran yang positif dalam menjamin perlindungan hukum dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang ras, agama, serta jenis kelamin. Kebebasan sipil biasanya merujuk pada serangkaian kebebasan dasar yang mau tidak mau harus dijamin dalam sebuah negara jika negara itu ingin disebut demokratis. Kalau nggak mau demokratis nggak apa-apa atau kalau nggak jamin harap terima risikonya untuk disebut sebagai negara tidak demokratis. Contohnya jelas negara-negara komunis biasanya. Nah kebebasan sipil ini biasanya antara lain meliputi kebebasan berpikir kebebasan berpendapat kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama serta juga kebebasan pers. Hal-hal yang secara formal sudah masuk dalam konstitusi republik Indonesia pak Bill.

Tapi anda punya pandangan lain nggak atau anda punya elaborasi yang lebih jauh tentang apa yang dimaksud kebebasan sipil itu kenapa dia jadi penting.

William Liddle:

Saya kira anda sudah mengungkapkannya dengan sangat jelas, saya tidak mempunyai spesifik yang lebih fokus dari itu. Memang kalau di teori ilmu politik pada dasarnya demokrasi dianggap sangat bergantung pada tegaknya hak-hak sipil yang anda sebutkan tadi jadi sebuah demokrasi yang tidak menjamin hak-hak itu tidak bisa disebut sebagai demokrasi. Sebab misalnya hak berserikat, atau hak berkumpul, atau hak bicara, hak pers, hak memilih, dan hak dipilih. Kalau semua hak itu tidak diakui tidak ditegakkan oleh hukum ya negara itu tidak bisa disebut demokratis. Coba kita ingat kepada jaman demokrasi pancasila sebagaimana diberi nama oleh pak presiden soeharto dulu. Demokrasi pancasila kan tidak mengindahkan hak-hak itu. Dan memang bukan demokrasi.

Hamid Basyaib:

Biasanya hak-hak individu itu dikalahkan oleh apa yang biasanya disebut kepentingan umum.

William Lidle:

Ya memang, istilah demokrasi pengalaman saya adalah bahwa istilah demokrasi adalah suatu istilah yang populer di seluruh dunia jadi hampir tidak ada negara yang tidak menggunakannya. Termasuk negara-negara komunis dulu apalagi negara soeharto. Jadi dia mengatakan, mengklaim mengakui bahwa Indonesia adalah negara demokratis tetapi dia tidak memberikan hak-hak sipil yang akan membuat demokrasi itu berjalan dan dia menggunakan istilah pancasila untuk menutupi itu jadi seakan-akan dua kata yang bagus demokrasi dan pancasila digabungkan menjadi lebih bagus lagi tapi sebetulnya yang satu itu pancasila dipakai untuk membatasi demokrasi.

Hamid Basyaib:

Atau mundur sedikit kita menemui demokrasi terpimpin.

William Lidle:

Ah ya itu juga soekarno sama kan dia menggunakan istilah demokrasi juga tapi bukan demokrasi.

Hamid Basyaib:

Pak Bill kita mungkin agak filosofis sedikit kali ya, eh.. kenapa sih sebenarnya kebebasan sipil itu dianggap penting dan perlu dijamin?

William Lidle

Pertama saya kira sebab hak-hak itu bagaimana dengan sendirinya sebagai hak adalah sesuatu yang penting misalnya ditanya hak untuk beragama atau tidak beragama, saya tidak tahu sejauh mana itu dipraktekkan di Indonesia tapi pada umumnya di negara-negara lain hak untuk tidak beragama juga dijamin.

Hamid Basyaib:

Sama kuatnya dijamin ya dengan hak untuk beragama.

William Lidle:

Ya jadi orang tidak diarahkan untuk memilih salah satu agama tapi boleh tidak beragama tapi itu kan penting misalnya kalau saya pada umur 18 mengambil kesimpulan bahwa saya tidak mau beragama lagi meskipun selama 18 tahun sebelumnya saya dibesarkan dalam salah satu tradisi agama, saya seharusnya punya hak untuk meninggalkan agama, itu hak pribadi saya sebagai manusia, saya setuju kalau prinsip-prinsip pokok tentang bagaimana kita mau hidup di masyarakat, kita kan tidak hidup di luar masyarakat tapi tidak harus selalu hidup di dalam masyarakat tapi kita harus hati-hati supaya masyarakat itu tidak membatasi hak kita supaya yang dimaksudkan dengan masyarakat adalah sesuatu yang memungkinkan setiap individu mencapai cita-citanya.

Hamid Basyaib:

Di dalam teokrasi hak untuk tidak beragama dilarang atau tidak dijamin. Di negara komunis sebaliknya hak untuk beragama dilarang. Jadi di tengah itu adalah demokrasi ya semestinya ya.

William Lidle:

Yang punya prinsip tersendiri dimana setiap individu dijamin hak-haknya seperti kita sebutkan tadi. Nah sebagian dari hak itu berguna untuk dirinya sendiri seperti saya katakan misalnya dengan agama tapi sebagian juga merupakan instrumen atau alat untuk mencapai kebaikan lain atau tujuan lain. Misalnya hak untuk memilih, itu kan tidak penting tentang hak memilih di dalam pemilu. Itu tidak penting kecuali dikaitkan dengan pemerintahan yang demokratis. Itu penting

bagi kita untuk memilih para pejabat yang akan menguasai kita atau akan mengambil keputusan kolektif. Jadi penting juga, tapi penting di dalam konteks.

Hamid Basyaib:

Bisa dikatakan bahwa kebebasan sipil itu bisa jadi parameter penting untuk mengukur suatu negara apakah dia demokratis atau tidak.

William Lidle:

Ya betul. Nah orang seperti Farid Zakaria seorang intelektual Amerika kan menulis buku yang berjudul *Illiberal Democracy* dimana dia mencoba memisahkan antara demokrasi yang liberal yang berarti dengan kebebasan pokok. Isitilah liberal itu kalau bahasa Inggris artinya intinya adalah kebebasan pokok yang kita bicarakan tadi. Farid Zakaria mencoba memisahkan antara demokrasi liberal dengan demokrasi yang tidak liberal. Bagi saya tidak bisa dipisahkan begitu. Demokrasi memerlukan liberal dalam pengertian hak-hak sipil kalau tidak ada itu tidak ada demokrasi.

Hamid Basyaib :

Jadi yang mau anda bilang adalah yang disebut demokrasi itu dengan sendirinya berarti liberal.

William Lidle:

Betul

Hamid Basyaib:

Yang tidak liberal tidak bisa disebut demokrasi

William Lidle:

Tidak bisa disebut demokrasi. Sebab kalau kita tidak punya hak untuk beragama hak berekspresi hak berserikat dan lain sebagainya. Hak untuk memilih itu tidak berarti lagi .

Hamid Basyaib:

Nah anda menyebut-nyebut Farid Zakaria ini memang intelektual muda Amerika yang sedang naik daun katakan ya, salah satu yang paling menonjol dia punya kolom tetap di *News Week* dia editor *News Week* internasional dia dulu di *foreign affairs* dan ya bukunya soal demokrasi illiberal, anda menganggap pemilahan ala Farid Zakaria ini tidak perlu atau tidak....

William Lidle:

Tidak perlu, memang sebab yang saya lihat misalnya di Iran. Iran menurut saya bukan sebuah negara demokratis.

Hamid Basyaib:

Dan tidak perlu disebut sebagai demokrasi illiberal.

William Lidle:

Nah itu yang saya maksudkan tidak perlu disebut seperti itu sebab seperti soeharto juga kita bisa mengatakan bahwa orde baru adalah demokrasi illiberal sebab ada pemilihan umum setiap 5 tahun. Tapi bagi saya itu kerancuan, mengacaukan istilah demokrasi atau mengaburkan istilah demokrasi.

Hamid Basyaib:

Nah ini masalahnya saya kira ya, Farid Zakaria punya pendapat begini pak Bill bahwa dia membedakan demokrasi dan kebebasan sipil. Demokrasi adalah satu hal dan kebebasan sipil adalah hal lain. Dan keduanya tidak necessarily niscaya beriringan dan saya kira dia

bertolak dari pengalaman-pengalaman empiris di beberapa negara ya. bahwa sistemnya demokrasi artinya yang disebut demokrasi prosedural atau pemilu dan sebagainya.

William Lidle:

Nah ini juga agak merancukan masalah kalau kita menggunakan istilah demokrasi prosedural dan demokrasi substansi sebab istilah itu dulu dipakai oleh orang kiri, orang kiri yang menganggap bahwa demokrasi seperti kita tahu, demokrasi di Amerika atau di Indonesia sekarang mereka cap demokrasi prosedural atau juga disebut demokrasi borjuis. Artinya masyarakat bawah masyarakat bawah tidak menerima apa-apa dari kebijakan itu sebab yang dipilih di dalam sistem itu para politisi yang dipilih yang mencalonkan jadi pejabat adalah kaum borjuis itu dan mereka memimpin memerintah atas kepentingan kelompoknya sendiri bukan atas kepentingan masyarakat pada umumnya, jadi istilah substansi dan prosedural adalah sesuatu yang lain menurut saya yang berasal dari konsepsi kiri dan kanan itu.

Hamid Basyaib:

Jadi kalau anda anggap nggak perlu pemilahan gaya Farid Zakaria itu anda lebih memilih apa demokrasi dan otoritarian atau...

William Lidle:

Ya kalau saya, saya tidak keberatan kalau anda akan mau menggunakan istilah demokrasi liberal sebagai istilah ganti atau istilah yang maknanya sama dengan demokrasi. Tapi kadang-kadang lebih jelas apa yang dimaksudkan kalau kita mengatakan dengan demokrasi liberal. Kalau Farid Zakaria kalau dia memisahkan demokrasi dengan liberal, ya saya setuju juga bahwa demokrasi adalah suatu hal. Artinya demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana yang memerintah dipilih oleh masyarakat. tetapi tidak bisa dipisahkan secara konseptual, boleh saja definisi demokrasi adalah ini dan demokrasi hak pokok adalah lain tapi kedua-duanya harus digabungkan secara empiris. Kita tidak bisa mengatakan bahwa demokrasi tanpa hak sipil itu adalah demokrasi yang betul-betul bagaimana... mencapai hak-hak pokoknya.

Hamid Basyaib:

Ya tapi Farid Zakaria bukunya cukup berpengaruh ya bukunya pak? Itu...

William Lidle:

Ya memang berpengaruh. Ya maaf, saya agak malas membaca buku itu dan merenungkannya sedalam-dalamnya sebab saya mulai saya diberikan buku itu oleh seorang teman seorang mahasiswa Indonesia sebetulnya yang tertarik di Amerika dan saya mulai dengan membaca indeks. Di belakang dan saya mencari di sana, kata Indonesia. Dan saya temukan saya lupa berapa kali, mungkin lima atau enam kali.

Hamid Basyaib:

Sebagai contoh dari demokrasi iliberal.

William Lidle:

Saya mau lihat apa yang dimaksudkan, apakah Indonesia adalah salah satu contoh dari demokrasi iliberal atau bagaimana. Pokoknya di indeks itu istilah Indonesia ada beberapa kali. Antara lain saya tahu juga bahwa Farid Zakaria pernah datang ke Indonesia mungkin lebih dari satu kali. Teman-teman di sini juga membicarakan percakapan dengan dia dan lain sebagainya. Tapi pokoknya yang saya cari referensi itu dari indeks. Katakanlah lima atau enam kali, setiap penjelasan tentang Indonesia, salah.

Hamid Basyaib:  
Oh begitu?

William Lidle:  
Tidak ada yang benar. Penjelasannya tentang Indonesia deskripsi penggambarannya tentang politik di Indonesia dari lima atau enam referensi itu di indeks sama sekali tidak benar. Jadi apakah kita bisa.....

Hamid Basyaib:  
Jadi anda mau bilang bahwa dia tidak mengertia Indonesia.

William Lidle:  
Dia tidak mengerti Indonesia dan mungkin juga. Saya kan merasa bahwa saya cukup mengerti Indonesia tapi saya tidak mengerti iran misalnya sebaik saya mengerti Indonesia. Ya jadi saya cenderung percaya saja kepada apa yang dia katakan tentang iran misalnya sebab saya tidak lebih tahu. Tapi kalau Indonesia dan saya baca ini dan salah semua. Aduh... sudah deh.

Hamid Basyaib:  
Ok. Kita akan istirahat sebentar pak Bill. Saudara anda masih bersama saya Hamid Basyaib basyaib dalam Forum Freedom pagi ini dan tamu kita adalah profesor William Lidle lidle dari ohio state university dan kita akan kembali sebentar lagi.

#### IKLAN

Hamid Basyaib:  
Saudara selamat pagi lagi dan anda masih bersama saya Hamid Basyaib dan Forum Freedom dan tamu saya adalah profesor dari ohio state university pak Bill Lidle yang sedang berada di Indonesia. Tadi kita sudah bicara cukup banyak tentang sistem-sistem yang berbeda, dan salah satunya yang sangat tidak disukai oleh pak Bill adalah pemilahan oleh Farid Zakaria tentang demokrasi liberal dan illiberal, dan dia juga mengkritik bahwa pemahaman Farid Zakaria tentang Indonesia yang cukup banyak disebut dalam bukunya itu ternyata salah semua menurut pak Bill. Tapi kita akan beralih sedikit pak Bill sekarang. Saya melihat Indonesia sekarang sejak reformasi, mempunyai tingkat kebebasan politik yang sangat tinggi yang bagus sekali. Ada banyak orang-orang yang tiba-tiba masuk ke dalam kancah politik formal, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita duga akan menjadi anggota parlemen misalnya, akan jadi walikota, akan jadi bupati, dan itu cukup banyak teman saya pribadi yang mungkin belasan orang atau puluhan orang teman saya pribadi yang jadi bupati di daerah-daerah, jadi anggota parlemen di pusat maupun daerah. Intinya adalah kebebasan politik jadi begitu tinggi, dan juga munculnya institusi-institusi baru untuk memperkuat proses demokratisasi ada komisi yudisial KPK dan seterusnya, tapi di sisi lain kita melihat merosotnya kebebasan sipil, berupa contohnya juga banyak misalnya penyerbuan markas besar ahmadiyah tempo hari dan tidak satupun pelakunya diadili dan beberapa cabang ahmadiyah di kota-kota lain khususnya di jawa barat juga ada penutupan gereja atau tempat-tempat yang diduga sebagai gereja penyalah gunaan dianggap oleh kalangan islam misalnya umumnya kasusnya tidak ada sedikitpun. Jadi intinya adalah rasa kebebasan sipil itu terasa terancam.

William Lidle:  
Mungkin kita harus memisahkan beberapa hal yang pertama adalah masalah negara hukum yang belum sempat kita bicarakan, tapi beberapa contoh anda sangat berkaitan dengan negara hukum. Artinya kalau

kantor JIL katakanlah sebagai contoh diserang dan polisi tidak datang atau polisi datang tapi mereka tidak berbuat apa-apa tidak menangkap orang yang menyerang atau kalau mereka menangkap lantas hakim disuap, atau ya..kan macam-macam hal bisa terjadi di sini, supaya yang memperlemah negara hukum di Indonesia, negara hukum di Indonesia belum pernah tegak sebetulnya, dan di dalam alam demokrasi sekarang ya belum juga. Tapi mungkin ada segi lain yang harus kita bicarakan dan di sini mungkin saya masih agak bingung tapi cobalah, tapi saya baca di koran belakangan ini tentang masalah pornografi dan pornoaksi. Lucu bahasa Indonesia ini ada istilah pornoaksi, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan sebenarnya tapi kedengarannya agak menarik.

Hamid Basyaib:

Rancangan undang-undangnya sedang dibicarakan.

William Lidle:

Ya, itu sedang dibicarakan dan saya mengatakan bahwa saya mengikuti perdebatan ini dengan sangat tertarik kepada perdebatan ini dan saya pun ingin menyimpulkan sesuatu nanti hubungannya dengan hak sipil. Saya sendiri belum tahu bagaimana pendapat saya apakah ini melanggar hak sipil atau tidak. Coba begini saya jelaskan, kalau di Amerika ada beberapa undang-undang saya kira di tingkat negara bagian dan juga di tingkat pusat yang mengatur masalah pornografi. Jadi artinya majalah-majalah yang dengan isi yang dianggap pornografi menurut sebuah standar dilarang yang lain-lain diatur. Jadi misalnya harus dibungkus dengan plastik itu kan undang-undang. Dibungkus dengan plastik ditaruh di atas rak buku, tidak bisa di toko, tidak bisa dijual kepada orang di bawah umur. Hal-hal seperti itu semua merupakan undang-undang.

Hamid Basyaib:

Pembatasan ya?

William Lidle:

Pembatasan. Tapi kan pembatasan bisa juga melarang misalnya contoh yang sangat jelas adalah pornografi anak. Itu dilarang. Anda tidak bisa mengambil gambar pornografis dari anak, anda tidak bisa mengambil, kalau anda mengambil dan disebar di internet misalnya, anda bisa dihukum. Apalagi diterbitkan di dalam majalah atau apa sama sekali dilarang. Nah apakah itu melanggar hak sipil seseorang di Amerika, saya kira nggak. Ini masih di dalam batas hukum yang wajar. Nah saya tidak tahu bagi saya di Amerika saya sendiri tidak ingin melihat undang-undang pornografi di Amerika. Sebab saya kira kita akan setuju bahwa undang-undang itu cenderung membatasi hak orang untuk membuat barang kesenian misalnya. Banyak masalah bagi kebebasan kreatif di sebuah masalah yang bisa dipengaruhi oleh undang-undang tentang pornografi, jadi pada umumnya saya lebih suka kalau negara tidak memainkan peran di situ. Tetapi saya kita kita harus memisahkan antara sesuatu di mana sebuah negara demokratis berhak mengatur sesuatu dan daerah di mana mereka tidak berhak. Nah kalau yang kita bicarakan adalah kebebasan ekspresi misalnya, pemerintah demokratis tidak berhak, sebab kalau mereka melarang orang, mengambil hak kebebasan untuk berekspresi secara bebas itu berarti demokrasi tidak bisa dipraktikkan.

Hamid Basyaib :

Ya banyak misalnya. euthanasia misalnya hak untuk mati, disuntik mati.

William Lidle:

Betul-betul. Itu juga kalau pendapat saya adalah seorang mungkin sangat liberal dalam pengertian saya tidak ingin supaya. Hak-hak saya macam-macam dibatasi oleh negara. Kalau pada suatu ketika nanti umur saya sudah lanjut saya sakit-sakitan tidak ada harapan sembuh lebih baik mati. Saya tidak tahu keputusan apa yang akan saya ambil nanti tapi saya ingin punya hak itu. Saya tidak ingin supaya orang lain yang menentukan atau melarang saya apalagi dengan alasan agama. Sebab alasan agama kan mengatakan bahwa agama melarang orang membunuh diri, misalnya. Hampir semua agama samawi saya kira melarang semua orang untuk membunuh diri. Tetapi kalau saya tidak memilih salah satu, tidak menganut salah satu dari agama itu apakah saya harus tunduk pada aturan agama. Agama harus di pisahkan dari negara menurut keyakinan saya.

Hamid Basyaib:

Betul-betul tidak mudah ya menjawabnya. Sekarang saya mencoba turun sedikit yang kurang filosofis sehingga lebih gampang kita membahasnya. Yaitu tentang bagaimana rezim-rezim atau pemerintahan-pemerintahan demokratis di dalam menghadapi kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang secara prinsip bersifat anti demokrasi? Misalnya dalam kasus yang jelas saja Hisbuth Tahrir. Hisbuth Tahrir itu yang dulu dibentuk oleh salah satu ulama palestina tahun 50-an 60-an dan sekarang di Indonesia ada juga cabangnya yang namanya Hisbuth Tahrir Indonesia dan sudah jelas mendeklarasikan diri bahwa dia anti demokrasi. Karena demokrasi itu buatan barat dan sebagainya, dalam pemilu misalnya mereka jelas sekali menolak. Tidak mau ikut pemilu dengan alasan tadi. Jadi intinya adalah bahwa dia anti demokrasi. Dan bagaimana negara demokrasi menyikapi kasus semacam ini?

William Lidle:

Nah memang kalau kasus ini atau masalah ini memang pernah menjadi hangat juga di Amerika pada tahun-tahun 40-an dan 50-an khususnya ketika partai komunis masih memberi kesan bisa menjadi besar di Amerika. Pada tahun-tahun 30-an 40-an partai komunis di Amerika ini orang Amerika/partai komunis cabang Amerika mereka bebas untuk bergerak waktu itu dan setelah perang dunia kedua dan ketika kami masuk perang dingin jaman perang dingin, ya waktu itu ada musuh di dalam selimut. Kan ada partai komunis yang berpihak kepada Uni Soviet tapi berada di Amerika dan dilindungi oleh demokrasi Amerika. Jadi ini menjadi dilema besar dan ada usaha dari beberapa orang senator orang yang terhormat misalnya Mc Carthy, ada usaha untuk melarang partai komunis. Seingat diatur memang ada smith act yang mengatur partai komunis pada waktu itu tapi seingat saya tidak akan saya bisa salah soalnya ini sejarah. Tapi seingat saya tidak melarang dan komprominya adalah bahwa ideologi komunis tidak dilarang, yang dilarang adalah tindakan yang bersifat makar? begitukah bahasa Indonesiannya? Tindakan untuk menggulingkan pemerintah. Jadi boleh saja anda memiliki ideologi itu, ideologi yang anti demokrasi tapi anda tidak boleh bertindak menggulingkan pemerintah yang demokratis. Di situlah batasnya. Dan saya kira kalau kita bicara masalah Hisbuth Tahrir ya begitu juga. Di Indonesia mereka kan tidak menggunakan kekerasan. Di Indonesia tapi saya tidak tahu kalau di negara lain. Tapi Hisbuth Tahrir di Indonesia di kenal tidak menggunakan kekerasan. Jadi kalau mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka itu adalah hak mereka.

Hamid Basyaib:

Tahun lalu pemerintahan Blair melarang Hizbuth Tahrir. Dengan alasan konstitusional bahwa ada satu kelompok di dalam masyarakat Inggris dalam negara Inggris ada kelompok yang cenderung membesar juga. Yang

dengan terang-terangan tidak setuju dengan sistem yang berlaku dan ingin mempromosikan sistem lain yang disebut sistem khilafah. Setelah sekian tahun di toleransi oleh pemerintah Inggris, ada trigger berupa pengeboman bulan juli kemarin setelah itu dilarang. Sehingga mereka tidak lagi.

William Lidle:

Ya saya tidak ingin mengomentari apa yang dilakukan perdana menteri Blair. Sebab tradisi Inggris selama ini adalah seperti tradisi Amerika. Tidak melarang organisasi berdasarkan ide, tetapi berdasarkan tindakan. Jadi kalau ada kasus bahwa Hisbuth Tahrir itu dianggap bertindak, saya harus melihat keadaan itu dulu. Tapi di Amerika, partai komunis tidak bisa dilarang sebab bukan partai yang bertindak tapi perorangan. Jadi kalau seorang pemimpin partai komunis di Amerika bertindak mencoba menggulingkan, mengumpulkan orang atau mengebom gedung, dan lain sebagainya, mengumpulkan orang untuk menggulingkan pemerintah. Dia bisa di hukum pribadinya tapi organisasinya tidak akan kena. Dan saya kira pada umumnya cara itu yang lebih baik.

Hamid Basyaib:

Tapi ide-idenya bisa dengan bebas didiskusikan diajarkan disekolah-sekolah?

William Lidle:

Ya. Kenapa tidak?

Hamid Basyaib:

Itu bedanya ya? Nah ini memang masalah. Bagaimana? Bisa nggak disebut anti demokrasi seperti di Jerman, yang sampai sekarang melarang Nazi?

William Lidle:

Ya bagaimana? Namanya kan manusia. Artinya pada prinsipnya keputusan pemerintahan Jerman untuk melarang gerakan nazi itu atau ragam seragam nazi, dan pidato-pidato seperti itu dan lain sebagainya itu semua sebetulnya melanggar prinsip demokrasi. Tapi saya kira kita harus lega sedikit, kita harus melihat sejarahnya. Di mana masyarakat Jerman betul-betul harus menciptakan sesuatu yang baru dan untuk itu mereka harus meninggalkan latar belakang sejarah yang sangat buruk itu. Jadi ya bisa di mengerti. Kalau saya adalah orang Jerman saya tidak tahu bagaimana sikap saya. Sebab seperti saya tegaskan tadi di Amerika, meskipun saya sangat anti komunis, saya tidak mau melarang partai komunis.

Hamid Basyaib:

Ok. Anda tetap demokratis pak Bill. Dengan itu kita tutup Forum Freedom kita pagi ini, dan terima kasih pak Bill Lidle, selamat pagi juga saudara anda bisa menelpon atau sms ke nomor telepon 02170497497 insya allah wassalam.